

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. *Agency Theory*

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Herawaty dan Anne (2017) teori keagenan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principals*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principals* serta memberi wewenang kepada *agent* membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

Menurut Aljana dan Purwanto (2017) teori keagenan modern mencoba untuk menjelaskan struktur modal perusahaan sebagai cara untuk meminimalisasi biaya yang dikaitkan dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Perusahaan yang dikuasai oleh manajerial, maka biaya keagenannya rendah. Hal ini disebabkan antara pemegang saham dan manajer terdapat tujuan yang sama.

Menurut Prasetyantoko (2008) faktor keagenan adalah masalah yang muncul akibat adanya kepentingan yang tidak selaras dari berbagai pihak yang melakukan kerja sama. Ketidak selarasan kepentingan tersebut umumnya terjadi antara pihak *principal* dan pihak *agent*. Pada dasarnya teori ini mengakui adanya informasi yang bersifat tidak sempurna sehingga menimbulkan kesenjangan antar pihak. Salah satu implikasi penting dari masalah agensi ini menyangkut kebijakan keuangan perusahaan, terutama terhadap dua pilihan apakah akan menggunakan utang atau modal sendiri untuk membiayai kegiatan usaha.

Menurut Jensen dan meckling (1976) dalam Tamrin dan Maddatuang (2019) membagi biaya keagenan menjadi tiga kelompok, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual cost*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitoring perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen bertindak untuk penentingan principal. Sedangkan *residual cost* timbul dari kenyataan bahwa tindakan agen kadang kala berbeda dari tindakan yang memaksimalkan kepentingan *principal*.

Hal ini merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi *agency cost* yang muncul, diperlukan suatu mekanisme kontrol dan penyelarasan kepentingan antar manajer, *stockholders*, dan *stakeholders*.

Menurut Jensen dan meckling (1976) dalam Tamrin dan Maddatuang (2019) menyatakan bahwa terdapat dua kondisi yang dapat terjadi dalam sebuah perusahaan publik yang disebabkan oleh asimetri informasi yaitu:

1. *Moral Hazard* yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection* yaitu suatu keadaan ketika *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperoleh atau terjadi sbegai sebuah kelalaian.

Menurut Widiawan (2011) *moral hazard* adalah suatu tipe asimetri informasi dimana manajer lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Hendriksen dan Breda, (1982) dalam

Widiawan (2011) menyebutkan hal ini terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian, sehingga prinsipal tidak dapat mengamati seluruh aksi manajer yang dapat berbeda dengan apa yang diharapkan *principal*. Para investor sebagai prinsipal secara khusus tidak ambil bagian dalam rangka operasi harian perusahaan, tetapi mereka melimpahkan tanggung jawab ini kepada manajemen yang berfungsi sebagai agen. Jika masing-masing pihak bertindak menurut kepentingannya sendiri, pemisahan ini menghasilkan konflik agensi. Solusi yang dapat ditempuh adalah melakukan perikatan dengan auditor (KAP) untuk mengevaluasi kinerja manajer.

Menurut Hartono (2015) *Adverse selection* dapat terjadi karena beberapa pihak seperti manajer, dan para pihak internal perusahaan lainnya lebih mengetahui kondisi saat ini, dan prospek ke depan perusahaan daripada prinsipal. Oleh karena itu, jika manajer bekerja dengan standar yang lebih baik daripada yang ditetapkan oleh prinsipal, maka prinsipal hanya akan menilai dengan standar umum yang diketahuinya saja. Hal ini menyebabkan kerugian bagi manajer karena seharusnya dapat dinilai lebih oleh prinsipal. Hal ini dapat diatasi dengan pemberian sinyal oleh manajer kepada prinsipal tentang kualitas kerja, salah satunya adalah dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang independen, dan dipercaya oleh publik.

### **2.1.2. *Stewardship Theory***

Menurut Jefri (2018) teori *stewardship* telah muncul di bidang tata kelola perusahaan sebagai alternatif teori keagenan, sehingga dapat dipahami bahwa asumsi dasar didefinisikan sebagai berlawanan dengan asumsi teori agensi. Menurut Astuti (2019) *stewardship* adalah teori yang menjelaskan motivasi kerja manajemen berorientasi pada pencapaian tujuan pihak *principal*. *Stewardship* dapat disebut sebagai

antithesis teori agensi yang berlandaskan pada pemenuhan kepentingan individu manajemen itu sendiri.

Menurut Hasnati (2014) teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku steward tidak akan meniggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Menurut Raharjo (2017) *Stewardship Theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, serta memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki oleh para pemegang saham. *Stewardship* memandang manajemen sebagai institusi yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *stakeholders* pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya.

### **2.1.3. Auditor Switching**

*Auditor Switching* aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan, hal ini sesuai dengan peraturan mengenai pergantian KAP melalui keputusan Menteri Keuangan 423/KMK.06/2008, mengharuskan perusahaan mengganti KAP yang telah mendapat penugasan audit lima tahun berturu-turut. Agar tidak akan menimbulkan pertanyaan karena bersifat mandatory, maka perusahaan wajib mengganti KAP-nya yang telah mengaudit selama lima tahun. Keputusan menteri KMK No. 423/KMK.06/2002 tentang adanya perbatasan praktik akuntan publik,

diharapkan dapat mempertahankan independensi auditor sehingga kualitas audit menjadi lebih tinggi.

Kewajiban rotasi auditor telah diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 359/KMK.06/2003 dan No 423/KMK.06/2002. Perubahan yang dilakukan di antaranya adalah pertama, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP untuk waktu 6 tahun buku berturut-turut oleh seorang Akuntan Publik dan 3 tahun buku berturut-turut oleh akuntan publik kepada klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2) akuntan publik dan kantor akuntan dapat menerima kembali penugasan. Hal bertujuan agar tidak adanya kedekatan yang lebih dalam antara manajer dengan auditor yang dapat menurunkan kualitas dari hasil audit yang dilakukan. Pergantian auditor atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor sehingga perusahaan yang menggunakan jasa audit wajib atau dengan secara sukarela untuk mengganti audit agar tidak adanya rasa kedekatan antara auditor dan manajer dari perusahaan. *Auditor Switching* yang bersifat mandatory perhatian utamanya beralih kepada auditor.

Aturan mengenai pergantian auditor secara mandatory telah ditetapkan oleh banyak negara. *The Sarbanas Oxley Act (SOX)* yang memuat aturan mengenai wajibnya perusahaan melakukan pergantian auditor dimana negara Amerika dipelopori oleh pergantian auditor secara mandatory oleh banyak negara. Pergantian auditor terjadi karena sukarela, maka perhatian utamanya adalah pada sisi klien. Klien mengganti auditornya saat tidak ada aturan yang mengharuskannya

pergantian tersebut, maka yang terjadi adalah auditor dipecat oleh klien atau auditor mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri auditor atau pemecatan auditor yang akan menjadi masalah adalah pada pihak klien yang aman menyebabkan melakukan pergantian auditor secara sukarela, sehingga klien harus mengganti auditor yang baru untuk memeriksa laporan keuangan mereka.

Menurut Nasir (2018) *Auditor Switching* merupakan pergantian KAP atau auditor yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat terjadi karena peraturan pemerintah ataupun keinginan perusahaan itu sendiri. *Auditor Switching* dalam hal ini dapat berupa pergantian KAP ataupun pergantian auditornya. Putusnya hubungan perusahaan dengan auditor yang lama yang telah sampai dengan batas lamanya kerjasama antara perusahaan dengan auditor dan menggantikannya dengan auditor yang baru merupakan pergantian auditor.

Pergantian tersebut membuat auditor yang baru memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengaudit laporan keuangan, hal ini disebabkan auditor baru harus mengenal dari awal karakteristik usaha klien dan sistem yang ada didalam perusahaan tersebut sehingga memerlukan waktu dalam pengauditan laporan keuangan. Kerjasama perusahaan dengan auditor yang lama harus melakukan pergantian auditor dan mengangkat auditor baru yang mengharuskan auditor baru berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, mengidentifikasi alasan klien dan mendapatkan kesepakatan dengan perusahaan.

#### **2.1.4. Fee Audit**

Menurut Susmiyanti (2016) *Fee Audit* merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh auditor yang besarnya bervariasi tergantung dari keuangan dan ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit, risiko audit, tingkat keahlian auditor, efisiensi yang dimiliki

auditor dan nama KAP yang melakukan jasa audit. Indikator dari *audit fee* dapat diukur dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya serta ukuran KAP.

Berdasarkan surat keputusan No. KEP.024/I-API/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee Audit* yang diterbitkan oleh Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (I-API) dalam menetapkan imbalan *audit fee*, akuntan publik perlu mempertimbangkan tahapan-tahapan pekerjaan audit, sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Audit

Pendahuluan perencanaan, pemahaman bisnis klien, pemahaman proses akuntansi, pemahaman struktur pengendalian internal, penetapan risiko pengendalian, melakukan analisis awal, menentukan tingkat materialitas, membuat program audit, risk assessment atas akun, dan fraud discussion dengan manajemen.

2. Tahap Pelaksanaan Audit

Pengujian pengendalian internal, pengujian substantive transaksi, prosedur analitis dan pengujian detail transaksi.

3. Tahap Pelaporan

Review kewajiban kontijensi, review atas kejadian setelah tanggal neraca, pengujian bukti final, evaluasi dan kesimpulan, komunikasi dengan klien, penerbitan laporan audit, dan capital commitment.

### 2.1.5. Opini Audit

Menurut Sari (2018) opini auditor memberikan informasi yang berguna bagi pengguna yang menunjukkan kesesuaian atas laporan keuangan suatu perusahaan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan khususnya para investor. Opini audit yang baik harus mengemukakan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit sesuai

dengan ketentuan standar akuntansi keuangan dan tidak ada penyimpangan material yang dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan.

Opini audit diberikan setelah seorang auditor mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Opini seorang auditor merupakan pernyataan akan kewajaran suatu laporan keuangan pada suatu perusahaan. Menurut Sari (2018) secara umum, perusahaan menginginkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari KAP yang disewanya, karena dengan opini ini perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan mampu menarik minat para investor untuk berinvestasi.

Dalam Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) SA Seksi 110, tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independent pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Pemberian opini auditor terhadap laporan keuangan ialah sebagai bagian informasi utama dalam laporan audit tersebut. Ada beberapa tahap dalam pemberian opini oleh auditor sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang telah dibuatnya.

Tanggung jawab auditor dalam mengaudit sebuah laporan keuangan yaitu dengan menilai apakah terdapat kesamaan besar terhadap kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu tertentu. Sehingga saat auditor telah selesai mengaudit suatu laporan keuangan dan menetapkan bahwa terdapat keraguan dalam kemampuan manajemen suatu perusahaan untuk melanjutkan usahanya dengan opini *going concern*,



maka auditor dapat memilih apakah ingin mengeluarkan *unqualified report* atau *disclaimer* opini.

Untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan yang telah diaudit maka dalam paragraf ketiga dalam laporan audit terdapat pendapat untuk menyatakan pendapat auditnya. Menurut Bastian (2007) Ada lima jenis pendapat atau opini yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan auditan, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam Laporan Audit. Keadaan-keadaan tersebut antara lain meliputi pembatasan ruang lingkup audit atas bagian tertentu dalam laporan keuangan, adanya hal-hal tertentu yang perlu ditekankan, adanya keadaan dimana suatu bagian dalam laporan keuangan auditan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum tetapi penyajian tersebut adalah lebih memadai dalam menyajikan informasi keuangan auditan.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan auditan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

#### 4. Pendapat Tidak Wajar

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan auditan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

#### 5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan

### **2.1.6. Pertumbuhan Perusahaan**

Menurut Budiono dan Yasinta (2015) laju pertumbuhan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan suatu perusahaan pada masa yang akan datang. Menurut Kasmir (2008) rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari tingkat penjualan sebuah perusahaan. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu.

Menurut Utami (2015) tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan yang semakin tinggi menunjukkan perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya. Peningkatan pertumbuhan penjualan menandakan perusahaan tersebut lebih dapat mempertahankan kelangsungan usahanya serta menurunkan potensi terjadinya kondisi kesulitan keuangan dibandingkan perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang negatif atau rendah.

Menurut Menurut Eli (2008) dalam Utami (2015), pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal

perusahaan karena pertumbuhan yang baik memberi tanda bagi perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan dan investor pun akan mengharapkan perkembangan yang baik dari tingkat pengembalian investasi yang dilakukan.

### **2.1.7. *Financial distress***

Menurut Atamaja (2008) dalam Muflihah (2017) *Financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam tidak bisa mempertahankan kelangsungan usahanya. *Financial distress* dimulai dengan ketidak mampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuidasi, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.

Menurut Irfani (2020) *Financial distress* menggambarkan kondisi kegagalan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan disertai dengan penghapusan atau pengurangan dalam pembayaran deviden. Kondisi ini bermula dari terjadinya perubahan laba secara terus-menerus yang cenderung bergerak kearah negatif.

Tekanan keuangan (*financial distress*) suatu keadaan dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan. Tekanan keuangan dapat diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara arus kas dan dasar saham arus kas ada dua bentuk yaitu:

1. Insolvensi teknik, merupakan keadaan dimana perusahaan dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat kewajiban telah jatuh tempo.

2. Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan diartikan dalam ukuran kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban.

Menurut Ratna dan Marwati (2018) Ada beberapa indikator untuk mengetahui tanda-tanda kesulitan keuangan yang dilihat dari pihak internal perusahaan yaitu:

1. Turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi.
2. Turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan.
3. Ketergantungan terhadap utang sangat besar.

Sebaliknya, beberapa indikator untuk mengetahui tanda-tanda kesulitan keuangan yang dilihat dari pihak eksternal yaitu:

1. Penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham selama beberapa periode berturut turut.
2. Penurunan laba secara terus-menerus dan perusahaan mengalami kerugian.
3. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha.
4. Pemecatan pegawai secara besar-besaran.
5. Harga dipasar mulai menurun terus menerus.

Menurut Muflihah (2017) apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka dapat membuat para stakeholder seperti investor (pemegang saham), calon investor dan kreditur akan enggan untuk berinvestasi atau memberi pinjaman ke dalam perusahaan tersebut. Dan apabila perusahaan tidak bisa menemukan solusi, dapat dipastikan perusahaan tidak dapat melanjutkan usahanya atau bangkrut.

Untuk mengetahui suatu perusahaan mengalami *Financial distress* dapat diketahui dengan salah satu cara menggunakan analisis

rasio. Satu diantaranya adalah rasio Solvabilitas. Menurut Kasmir (2008) rasio solvabilitas mengukur sejumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi angka rasio total hutang atau total aktiva semakin besar resiko untuk suatu perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan.

Apabila suatu perusahaan pembiayaan lebih banyak menggunakan utang, hal ini berisiko akan terjadi keesulitan pembayaran di masa yang akan datang akibat utang lebih besar dari asset yang dimiliki. Jika keadaan ini tidak dapat diatasi dengan baik, potensi terjadinya financial distress pun semakin besar. Kebangkrutan biasanya diawali dengan terjadinya moment gagal bayar hal ini disebabkan semakin besar jumlah hutang, semakin tinggi probabilitas *financial distress*.

Pada prinsipnya rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan utang perusahaan. Artinya, rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan utang perusahaan. Artinya, seberapa besar porsi utang yang ada di perusahaan jika dibandingkan dengan modal atau asset yang ada. Dengan menaikkan dana melalui utang, pemilik dapat mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang terbatas.

1. Kreditor memiliki adanya ekuitas, atau modal yang disediakan oleh pemilik (owner), sebagai margin pengaman, jika pemilik dana hanya menyediakan sebagian kecil dari pembiayaan total, risiko perusahaan dipikul terutama oleh kreditornya.
2. Apabila suatu perusahaan mendapatkan tingkat laba yang lebih tinggi atas dana pinjamannya daripada tingkat bunga yang dibayarkan atas dana tersebut, maka pengembalian atas modal pemilik diperbesar.

Penelitian ini menggunakan total *debt to equity ratio* (DER), dimana DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau utang.

Semakin besar DER, mencerminkan solvabilitas semakin rendah sehingga kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya rendah. Dalam persoalan total DER yang perlu dipahami bahwa, tidak ada batasan berapa total DER yang aman bagi suatu perusahaan, namun untuk konservatif biasanya total DER yang lewat 66% atau 2/3 sudah dianggap berisiko.

## 2.2. Kajian Empiris

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang Auditor Switching dengan menggunakan variabel yang berbeda-beda. Berikut ini peneliti menjabarkan penelitian sebelumnya dalam table berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama & Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Veroda & Romanus (2017)	Variabel Independen: Perubahan manajemen, Opini Audit dan <i>Financial distress</i> . Variabel Dependen: Auditor Switching	Teknik Analisis Deskriptif dan Regresi Logistik	Perubahan manajemen, opini audit, dan <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Auditor Switching</i>

2	Putra, I Gusti Bagus Pratama & Suryanawa I Ketut (2016)	Variabel Independen: Opini Adit, dan Reputas KAP. Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i> Variabel Moderasi: <i>Financial distress</i>	Teknik analisi multivariate dengan menggunakan regresi logistik	Opini audit berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> , sedangkan Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> dan <i>Financial distress</i> tidak mampu memoderasi pengeruh opini audit dan Reputasi KAP pada <i>Auditor Switching</i> .
3	Nasir, Anisa (2018)	Variabel Independen: Opini Audit, Pergantian Manajemen dan <i>Fee Audit</i> . Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i> Variabel Moderasi: <i>Financial distress</i>	Teknik analisis regresi logistik dan <i>moderated regression analysis</i> (MRA) SPSS 21.	Opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> , Pergantian manajemen dan <i>Fee Audit</i> berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> , sedangkan <i>Financial distress</i> tidak mampu memoderasi pengaruh opini audit dan pergantian manajemen terhadap <i>Auditor Switching</i> , namun mampu memoderasi pengaruh <i>Fee Audit</i> terhadap <i>Auditor Switching</i> .
4	Diandika, KAdk Harus & Badera, I Dewa Nyoman (2017)	Variabel Independen: <i>Fee Audit</i> . Variabel Dependen: <i>Auditor Switching</i> . Variabel Moderasi: <i>Financial distress</i>	Teknik analisis statistic deskripti, Regresi logistic dan uji interaksi.	<i>Fee Audit</i> berpengaruh positif pada <i>Auditor Switching</i> dan <i>Financial distress</i> mampu memperkuat pengaruh <i>Fee Audit</i> pada <i>Auditor Switching</i>
5	Tisna, Ni Wayan Wulan & Saputrea, I Dewa Gede Dharma (2017)	Variabel Independen: Opini Audit dan Pertumbuhan Perusahaan Variabel Dependen:	Teknik Analisi Regresi Logistik dengan	Opini Audit dan Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh pada <i>Auditor Switching</i> , dan <i>Financial distress</i> memperlemah pengaruh

		<i>Auditor Switching</i> , Variabel Moderasi: <i>Financial distress</i>	menggunakan SPSS.	opini audit dan Pertumbuhan Perusaaan terhadap Auditor Switching.
6	Sari, Feby Fitria (2018)	Variabel Independen: Opini Audit, <i>Financial distress</i> , Perubahan ROA dan PERTumbuhan Perusahaan Klien Variabel Dependen: Auditor Switching	Teknik analisis regresi logistic dengan menggunakan SPSS.	Opini Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Auditor <i>Switching</i> , sedangkan <i>Financial distress</i> , Perubahan ROA dan Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Auditor <i>Switching</i> .

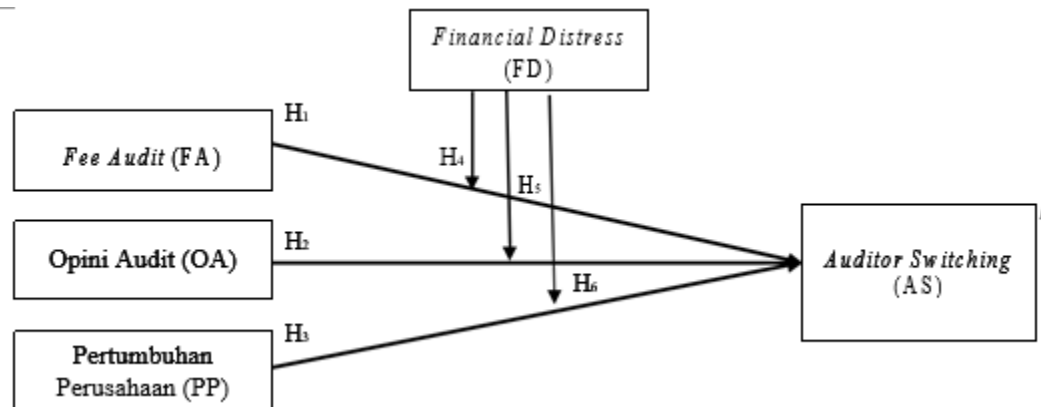
Sumber: Data Olahan, 2020

## 2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2014), kerangka konseptual yang baik dalam suatu penelitian dapat menjelaskan secara teoritis keterkaitan antar variabel yang akan diteliti. Penelitian ini diawali dengan fenomena atau isu yang dilakukan Kantor Akuntan Publik dalam melanggar kode etik profesi akuntan. Kasus tersebut menyebabkan munculnya peraturan mengenai *Auditor Switching* di Indonesia. Kerangka konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa *Fee Audit*, opini audit, dan pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi *Auditor Switching* dengan dimoderasi oleh *financial distress*. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan kerangka konseptual tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut:





**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Konseptual**

### 2.3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual, telaah teoritis dan penelitian terdahulu. Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Pengaruh *Fee Audit* terhadap *Auditor Switching*.

Menurut Nasir (2018) *Fee Audit* merupakan *fee* atau biaya yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Besarnya *Fee Audit* dapat bervariasi tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan biaya profesional lainnya. *Fee Audit* biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit. Ketika *Fee Audit* melampaui batas toleransi yang ditetapkan perusahaan, perusahaan akan mencari KAP dengan menawarkan *Fee Audit* yang lebih rendah meskipun mereka melepas KAP yang biasa mereka gunakan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Jika *Fee Audit* yang diberikan lebih besar dari batas toleransi, maka akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan *Auditor Switching*.

Hasil penelitian Nasir (2018), Diandika & Badera (2017), dan Amalia (2015) yang menyimpulkan bahwa *Fee Audit* memiliki pengaruh terhadap *Auditor Switching*. Hal ini dikarenakan ketika *Fee Audit* melampaui batas toleransi yang ditetapkan perusahaan, perusahaan akan mencari KAP dengan penawaran fee audit yang lebih rendah meskipun mereka harus melepas KAP yang biasa mereka gunakan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan.

**H<sub>1</sub> : *Fee Audit* berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching***

## **2. Pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching***

Menurut Nasir (2018) Opini Audit merupakan pernyataan pendapat yang diberikan auditor dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Opini audit merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan *Auditor Switching*. Faradila & Yahya (2016) dalam Hendricson & Espahbodi (1991) menyatakan bahwa isu yang sangat sensitif dalam hubungan *Auditor Switching* adalah kualifikasi opini audit, terutama dimana salah satu tujuan manajemen adalah menerima opini wajar tanpa pengecualian dari auditor yang bertujuan sebagai upaya daya tarik investor.

Hasil Penelitian Tisna (2017), Faradila & Yahya (2016), Putra & Suryanawa (2016), dan Damayanti & Sudarma (2007) menyimpulkan bahwa Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Hal ini dikarenakan semakin sering klien yang mendapat opini audit yang tidak diharapkan atas laporannya akan cenderung mengganti KAP. Selain itu pula, kualitas opini audit cukup menentukan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor.

**H<sub>2</sub> : Opini Audit berpengaruh Negatif terhadap *Auditor Switching***

### 3. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Auditor Switching

Menurut Faradila & Yahya (2016) pertumbuhan perusahaan akan cenderung untuk melakukan pergantian auditor karena membutuhkan auditor yang memiliki kualitas lebih baik. Tisna (2017) pertumbuhan akan dilihat dari tingkat pendapatan perusahaan, karena pendapatan adalah kegiatan pokok perusahaan. Ketika bisnis perusahaan sedang bertumbuh, permintaan akan independensi yang lebih tinggi dan KAP yang lebih berkualitas dibutuhkan untuk mengurangi biaya keagenan serta memberikan layanan *non-audit* yang dibutuhkan untuk meningkatkan perluasan perusahaan.

Hasil penelitian Tisna & Saputra (2017), Fitriani & Zulaikha (2014), dan Widowati (2013) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Auditor Switching. Selain itu, Huson et al. (2000) dalam Nazri et al. (2012) menyatakan bahwa hubungan positif antara pertumbuhan aset perusahaan dan perubahan auditor menunjukkan bahwa pertumbuhan yang cepat memerlukan peningkatan substansial dalam volume transaksi dan sistem pengendalian keuangan yang lebih besar yang mungkin memiliki keahlian untuk menyediakan jasa khusus. Dalam hal ini perusahaan melakukan pergantian kantor akuntan publik apabila perusahaan mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan asumsi teori agensi yang menyatakan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan menggunakan jasa auditor yang berkualitas perusahaan merasa bahwa reputasinya akan lebih baik di masyarakat, khususnya pemegang saham, sehingga para

pemegang saham akan percaya bahwa kinerja perusahaan semakin baik dan mereka akan tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut.

**H<sub>3</sub> : Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Auditor Switching**

**4. Hubungan *Fee Audit* terhadap Auditor Switching dengan *Financial distress* sebagai variabel moderasi.**

Menurut Nasir (2018) dan Hudaib & Cooke (2005) menyatakan bahwa manajer perusahaan yang rasional akan memilih untuk berganti ke KAP yang berkualitas tinggi dan cenderung membayar *Fee Audit* yang lebih tinggi apabila perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak sehat atau sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan. *Auditor Switching* dapat disebabkan oleh *Fee Audit* yang relatif tinggi yang ditawarkan auditor pada perusahaan sehingga tidak ada kesepakatan antara perusahaan dengan KAP yang mendorong perusahaan untuk melakukan *Auditor Switching*. (Diandika & Badera, 2017).

Hasil penelitian Nasir (2018) dan Diandika & Badera (2017) menyatakan bahwa *Financial distress* mampu memoderasi hubungan *Fee Audit* dengan *Auditor Switching*. Hal ini dimungkinkan karena manajer perusahaan yang rasional akan memilih untuk berganti ke KAP yang berkualitas tinggi dan cenderung membayar *Fee Audit* yang lebih tinggi apabila perusahaan sedang dalam kondisi tidak sehat atau sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan.

**H<sub>4</sub> : *Financial distress* memoderasi hubungan *Fee Audit* terhadap Auditor Switching.**

**5. Hubungan Opini Audit terhadap Auditor Switching dengan *Financial distress* sebagai variabel moderasi.**

Kondisi *Financial distress* terlihat dari rasio keuangan perusahaan yang selalu menurun. Menurut Nasser et. al (2006) pada umumnya jika perusahaan mengalami kesulitan kondisi keuangan, maka ia cenderung akan mempertahankan auditor auditornya dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan para pemegang saham. Dalam kondisi ini, maka kemungkinan perusahaan akan mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian, sehingga untuk menghindari opini tersebut yang dapat merugikan perusahaan maka perusahaan memilih mengganti KAP agar dapat memberikan opini sesuai yang diharapkan (Susilowati, 2014).

Hasil Penelitian Susilowati (2014) menyatakan bahwa *Financial distress* mampu memoderasi hubungan *opini going concern* terhadap *Auditor Switching*. Hal ini dikarenakan tujuan *Auditor Switching* yaitu agar perusahaan bisa mendapatkan opini sesuai dengan harapan perusahaan dan perusahaan mengharapkan auditor tersebut dapat membantu untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang sedang bermasalah agar dapat membaik.

**H<sub>5</sub> : *Financial distress* memoderasi hubungan opini audit terhadap *Auditor Switching***

**6. Hubungan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Auditor Switching dengan *Financial distress* sebagai variabel moderasi.**

Pertumbuhan perusahaan diartikan meningkatkan aset masa lalu yang menggambarkan profitabilitas dan pertumbuhan aset mendatang (Taswan, 2003). Penelitian Wijayani & Januarti (2011), dan Ismail (2008) memperlihatkan pertumbuhan perusahaan dapat

dilihat dari meningkatnya penjualan yang memberikan pengaruh pada *Auditor Switching*. Jika *Financial distress* dikaitkan dengan pertumbuhan perusahaan dan *Auditor Switching* maka *Auditor Switching* meningkat, karena semakin tinggi pertumbuhan perusahaan maka perusahaan cenderung melakukan *Auditor Switching* untuk meningkatkan kualitas pada perusahaan, namun dengan adanya *Financial distress* di perusahaan maka akan memperlemah pengaruh pertumbuhan perusahaan pada *Auditor Switching* yang akan menyebabkan *Auditor Switching* menurun dikarenakan perusahaan dengan kondisi keuangan tidak stabil lebih memungkinkan dalam mempertahankan auditornya dalam upaya menjaga kepercayaan pemakai laporan keuangan.

**H<sub>6</sub> : *Financial distress* memoderasi hubungan pertumbuhan perusahaan terhadap *Auditor Switching***